

Bulog Minta Stimulus untuk Serap Gabah Petani

Oleh Ridho Syukra

JAKARTA – Perum Bulog meminta pemerintah memberikan stimulus khusus berupa dana cadangan bagi BUMN pangan tersebut guna menyerap dan membeli gabah petani sebagai pengadaan cadangan beras milik pemerintah (CBP).

Bulog telah mengajukan tambahan anggaran untuk penyerapan gabah sekitar Rp 10 triliun kepada Kementerian Pertanian (Kementan) yang setara dengan pengadaan 1 juta ton beras, namun pengajuan anggaran tersebut harus mendapat izin dari pemerintah melalui rakortas di Kemenko Perekonomian.



Tri Wahyudi Saleh

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh menjelaskan, pada masa panen raya padi ini, seharusnya harga gabah di tingkat petani mulai mengalami penurunan. Namun kenyataannya rata-rata harga gabah saat ini masih di atas harga pembelian pemerintah (HPP). "Kenyataannya kalau kita lihat sesuai HPP gabah kering panen (GKP) yang sudah naik di level Rp 4.200 per kilogram (kg), harga gabah masih di atas HPP. Ini membuat kesulitan bagi Bulog. Jadi, mungkin saran dari Bulog kepada pemerintah untuk memberikan stimulus khusus dana cadangan untuk membeli gabah dan beras," kata Tri di Jakarta, Rabu (15/4).

sebagai CBP. Apabila Bulog diminta menyerap gabah dan beras sebanyak-banyaknya dengan kredit komersial ke perbankan, hal ini tentu cukup memberatkan juga bagi Bulog. "Di sisi lain, kita memang mempunyai tugas untuk menyerap. Jadi kami kira perlu ada stimulus khusus untuk tambahan anggaran untuk Bulog. Jika anggaran disetujui maka Bulog dapat menyerap gabah petani secara maksimal di atas HPP," ungkap dia.

Sesuai Permendag No 24 Tahun 2020 tentang Penetapan HPP untuk Gabah atau Beras, HPP GKP di tingkat petani naik dari Rp 3.700 per kg menjadi Rp 4.200 per kg dan di penggilingan dari Rp 3.750 per kg menjadi Rp 4.250 per kg. Tri Wahyudi menyebutkan, harga rata-rata GKP di tingkat penggilingan pada April ini diperkirakan Rp 4.977 per kg atau di atas HPP yang ditentukan Permendag sebesar Rp 4.200 per kg. Bulog sendiri menargetkan pengadaan beras pada tahun ini sebanyak 950 ribu ton, dengan target penyerapan pada April ini 222 ribu ton setara beras, pada Mei sebesar 207 ribu ton beras, dan Juni sebesar 148 ribu ton.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyatakan, pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini tidak mengganggu musim panen raya yang terjadi pada April 2020, produksi panen di beberapa wilayah tetap berjalan lancar dan terkendali. Kementan memastikan musim panen berjalan lancar dan pihaknya akan berada di garda paling depan untuk terus memantau perkembangan produksi panen. Saat ini, terdapat 382 kabupaten di Indonesia yang sedang melakukan panen raya. "Berdasarkan laporan petani, panen raya tidak terganggu Covid-19, petani tetap pergi ke lapangan dengan melaksanakan protokol dari pemerintah dengan memakai masker dan menerapkan social/physical distancing," jelas Mentan.

distancing," jelas Mentan.

Pada Selasa (14/5), Mentan rapat daring dengan petani di 382 kabupaten yang sedang melakukan panen raya, rapat dilaksanakan di ruangan Agriculture War Room (AWR) Kementan. Perkiraan panen raya berlangsung pada April dengan luas 1,73 juta hektare (ha) dengan produksi 5,20 juta ton beras dan berlanjut pada Mei 1,38 juta ha dengan produksi 3,81 juta ton beras. Pada masa puncak panen raya ini, Kementan terus melakukan antisipasi untuk menjaga kestabilan harga, salah satunya dengan Komando Strategi Penggilingan Padi melalui pendekatan Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi mengatakan, rata-rata harga di tingkat petani pada Maret lalu Rp 4.600 per kg dan ketika musim panen raya berlangsung harga di tingkat petani akan disesuaikan dengan Permendag No 24 Tahun 2020. Kementan juga bekerja sama dengan e-commerce untuk menjual beras kepada konsumen, Ditjen Tanaman Pangan sudah melakukan penandatanganan MoU dengan Bibli dalam pemanfaatan jasa penyediaan dan distribusi beras melalui platform daring. Kerja sama itu untuk mempermudah akses konsumen membeli beras dan juga menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar guna menekan penyebaran Covid-19.

Neraca 11 Komoditas Surplus Mentan SYL juga menegaskan bahwa neraca 11 komoditas pangan dalam keadaan surplus atau memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama di tengah masa pandemi Covid-19.

"Kalau dilihat ketersediaan kita, neraca kita khususnya protein daging, termasuk daging sapi, kerbau, ayam serta telur semua surplus. Saya melihat bahwa 11 pangan dasar pun surplus," kata SYL. Kondisi saat ini tidak menjadi penghalang bagi petani untuk tetap memproduksi dan pemerintah akan terus memantau dan membantu jika ada kesulitan. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa pangan harus tetap menjadi prioritas meskipun ada pandemi Covid-19 dan pangan merupakan kebutuhan dasar. Kementan menjamin stok pangan aman memasuki puasa yang tinggal seminggu lagi dan mengajak masyarakat agar tidak melakukan panic buying. (t/ant)



Produksi Garam

Seorang petani mengeringkan garam hasil panennya di Kawasan Penggaraman Talise, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (15/4/2020). Sebagian besar petani garam di tempat tersebut tetap berproduksi di tengah pandemi COVID-19 untuk memenuhi kebutuhan garam menghadapi bulan Ramadhan.

KKP Realokasi Anggaran Rp 483 Miliar

JAKARTA-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan realokasi anggaran Rp 483,74 miliar guna mengakselerasi pemulihan ekonomi di sektor perikanan yang terimbas pandemi Covid-19. Anggaran itu setara 9,12% dari total APBN-Perubahan KKP Tahun 2020 yang sebesar Rp 5,30 triliun, pagu anggaran KKP tahun ini menjadi Rp 6,44 triliun tapi sejalan program penghematan melalui Perpres No 54 Tahun 2020 maka anggaran KKP tahun ini menjadi Rp 5,30 triliun.

Anggaran Rp 483,74 miliar tersebut untuk 23 kegiatan di antaranya bakti nelayan, bulan bakti karantina ikan, asuransi budidaya ikan, bantuan induk, bibit, bibit rumput laut, pakan ikan, mesin pakan mandiri dan bahan baku, bantuan sarana pendukung revitalisasi tambak, perluasan Program Gemarikan, sarana rantai dingin, revitalisasi tambak, hingga Pengembangan Usaha Garam Rakyat (Pugar). Untuk kegiatan bakti nelayan misalnya, KKP menganggarkan Rp 12,70 miliar lebih, sedangkan perluasan Program Gemarikan dianggarkan lebih besar sekitar Rp 20 miliar.

Demikian disampaikan Menteri KP Edhy Prabowo dalam rapat kerja lanjutan dengan Komisi IV DPR tentang refocussing kegiatan, realokasi anggaran, serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 di Jakarta, kemarin. Penerima bantuan tidak hanya masyarakat perikanan tapi juga tenaga medis dan pekerja harian lepas yang ikut terdampak ekonomi imbas pandemi Covid-19. Harapannya, KKP dapat membantu menyerap produksi ikan dan olahannya sekaligus menyulunkannya pada masyarakat untuk pemenuhan gizi, utamanya bagi tenaga medis dan pekerja harian lepas seperti pengemudi taksi dan ojek online. "Menindaklanjuti kesimpulan raker sebelumnya pada 6 April untuk melakukan peningkatan anggaran bantuan pemerintah ke masyarakat KP, KKP telah merealokasi anggaran Rp 483,74 miliar," jelas Edhy.

Selain merealokasi anggaran untuk bantuan, KKP juga telah mengusulkan enam paket stimulus ekonomi di sektor KP dalam upaya mempercepat penanganan dampak Covid-19. Rinciannya, bantuan pemerintah untuk nelayan, pembudidaya, pengolah/pemasar, dan petambak garam Rp1,024 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat perikanan Rp 600 ribu per bulan selama tiga bulan melalui Kemensos, pembelian produk perikanan oleh BUMN perikanan, dan penurunan bea masuk tin plate dan kaleng jadi, serta pasta tomat dan tepung pengental saus sebagai bahan baku industri pengalengan ikan. "Kami juga mengusulkan pembelian garam hasil petambak oleh PT Garam, perluasan cakupan PMK No 23 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak dengan memasukkan kegiatan industri kelautan dan perikanan," jelas Menteri Edhy.

Dalam kesimpulan rapat kerja yang dibacakan Ketua Komisi IV DPR Sudin, Komisi IV menerima penjelasan Menteri Edhy mengenai refocussing kegiatan dan realokasi anggaran KKP setelah penyelesaian anggaran menjadi Rp 5,30 triliun, Komisi IV DPR meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan tidak memotong kembali ang-

garan KKP tahun ini mengingat nelayan, pembudidaya, petambak garam, serta pengolah dan pemasar produk perikanan yang terdampak langsung wabah Covid-19 wajib dilindungi sesuai UU No 7 Tahun 2016. Komisi IV DPR juga meminta KKP untuk melaksanakan program strategis guna menyangga produksi komoditas perikanan dan perikanan guna mempercepat pemulihan ekonomi dampak pandemi Covid-19.

Komisi IV juga meminta KKP mengusulkan kepada Menteri BUMN untuk mengeskan BUMN perikanan seperti Perum Perindo, PT Perinus, dan PT Garam, untuk menyerap komoditas perikanan dan garam dengan mempertimbangkan kualitas serta stabilitas harga dan memaksimalkan fungsi resi gudang dan sistem rantai dingin. Komisi IV juga meminta KKP tetap memberikan edukasi jarak jauh (online) kepada seluruh stakeholder dan pemangku kebijakan daerah serta tetap memberikan berbagai kemudahan bantuan sosial, seperti bantuan bibit, induk, rumput laut, dan lainnya. (t)

Minamas Siapkan Strategi Cegah Karhutla

JAKARTA-Minamas Plantation secara aktif mengambil langkah-langkah preventif dalam mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah itu mencakup koordinasi dengan masyarakat sekitar dan aparat yang berwenang, mengaktifkan Masyarakat Peduli Api (MPA), melakukan antisipasi dini di sekitar areal operasional Minamas. Hal itu dilakukan dalam rangka mendukung program pemerintah untuk mengatasi karhutla di Tanah Air.

Memasuki musim kemarau 2020, tim pemadam kebakaran di seluruh unit usaha Minamas Plantation termasuk PT Aneka Inti Persada di Kabupaten Siak, Riau, kemudian PT Bumireksa Nusa Sejati di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau, dan PT Tunggul Mitra Plantation di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, sudah menyiapkan pelatihan kebakaran yang dilaksanakan pada 9-17 Maret 2020 secara berkelanjutan. CEO Minamas Plantation Shamsuddin Muhammad mengatakan, sejak awal beroperasi, pihaknya telah menerapkan zero burning policy secara ketat di seluruh areal operasional untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan. "Kami juga melaksanakan inisiatif lainnya yang meliputi pencegahan dan penanganan karhutla," jelas Shamsuddin di Jakarta, kemarin.

Di bidang pencegahan sudah dilakukan inisiatif berbasis masyarakat seperti MPA, Program Desa Mandiri Cegah Api, dan Guru Peduli Api, sedangkan di bidang penanganan sudah dilakukan sosialisasi karhutla kepada masyarakat. Hingga saat ini, Minamas Plantation terus memantau situasi yang berlangsung di seluruh lokasi perusahaan secara detail, pemantauan dilakukan setiap hari melalui sistem plantation location intelligent universal management dengan menggunakan data-data dari satelit pada titik panas di peta areal konsesi.

Seluruh titik api yang terdeteksi segera dilaporkan kepada pihak berwenang dan prosedur yang sama akan diterapkan dalam standar operasional perusahaan. Minamas juga bekerja sama dengan pemerintah lokal untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat dan pihaknya berkomitmen untuk sepenuhnya mencegah karhutla sepanjang 2020. "Kami juga memiliki program pendekatan masyarakat melalui Program Desa Mandiri Cegah Api yang dibentuk sejak 2014 dan dilaksanakan di setiap desa sekitar operasional perusahaan yang hingga kini sudah mencapai 29 desa atau mencakup total areal desa binaan seluas 161 ribu hektare (ha)," ujar dia.

Sementara itu, patroli terpadu pencegahan karhutla berhasil menurunkan jumlah titik panas (hotspot) pada awal April 2020 di wilayah Sumatera. (dho)

Financial statement table for PT. MAP AKTIF ADIPERKASA TBK DAN ENTITAS ANAK, including sections for ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS, PENDAPATAN, LABA KOTOR, LABA USAHA, LABA SEBELUM PAJAK, BEBAN PAJAK PENGHASILAN, PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK, LABA BERSIH TAHUN BERJALAN, PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN, LABA BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA, and LABA PER SAHAM DASAR.